BAB II

TINJAUAN PUSATAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Pada bagian ini, peneliti akan menyajikan beberapa literatur terkait judul penelitian *Dampak Kebijakan Asylum And Immigration Act Prancis Terhadap Krisis Imigran*. Peneliti juga memberikan acuan terkait penelitian sebelumnya, kerangka konseptual, hipotesis, dan kerangka pemikiran.

Artikel pertama *"Assimilation and the Second Generation in Europe and America: Blending and Segregating Sosial Dynamics between Immigrants and Natives"* membahas dinamika sosial yang kompleks antara imigran dan penduduk asli, khususnya generasi kedua. Penulis mengeksplorasi bagaimana generasi kedua beradaptasi dengan budaya dominan sambil tetap mempertahankan identitas etnis mereka. Melalui analisis berbagai studi kasus di Eropa dan Amerika, jurnal ini menunjukkan bahwa proses asimilasi tidaklah linier, melainkan melibatkan interaksi yang beragam, di mana faktor-faktor seperti latar belakang sosial, ekonomi, dan kebijakan imigrasi memainkan peran penting dalam pengalaman individu.

Selain itu, jurnal ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi generasi kedua dalam mencapai integrasi sosial yang penuh. Meskipun banyak yang berhasil menggabungkan aspek budaya asal dan budaya baru, ada juga kecenderungan segregasi yang tetap ada dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan jaringan sosial. Dengan pemahaman mendalam tentang dinamika ini, penulis mendorong pentingnya kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan generasi kedua, guna menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan (Drouhot & Nee, 2019).

Artikel kedua *"The Migration Wave into Europe: An Existential Dilemma"* mengkaji tantangan dan dampak dari gelombang migrasi yang terjadi di Eropa, terutama dalam konteks politik, sosial, dan ekonomi. Penulis menggambarkan bagaimana migrasi massal memicu perdebatan sengit di berbagai negara Eropa,

terkait dengan identitas nasional, keamanan, dan respons terhadap krisis kemanusiaan. Analisis ini mencakup berbagai perspektif, termasuk pandangan penduduk asli dan imigran, serta dampak jangka panjang dari kebijakan migrasi yang diterapkan oleh pemerintah Eropa.

Artikel ini juga menyoroti bagaimana gelombang migrasi ini dapat dilihat sebagai dilema eksistensial bagi Eropa. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk menunjukkan solidaritas dan kemanusiaan terhadap para pengungsi; di sisi lain, terdapat kekhawatiran mengenai integrasi dan dampak terhadap kohesi sosial. Penulis menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang, di mana kebijakan migrasi tidak hanya mempertimbangkan aspek keamanan, tetapi juga hak asasi manusia dan potensi kontribusi positif dari imigran terhadap masyarakat. Dengan demikian, jurnal ini memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas isu migrasi di Eropa dan kebutuhan akan dialog yang konstruktif (Nirenstein, 2019).

Artikel ilmiah ketiga *"Acculturation Orientations of French and North African Undergraduates in Paris"* menyelidiki sikap akulturasi antara mahasiswa Prancis dan mahasiswa asal Afrika Utara yang belajar di Paris. Penelitian ini mencakup bagaimana kedua kelompok berinteraksi dan beradaptasi dengan budaya satu sama lain, serta faktor-faktor yang memengaruhi orientasi akulturasi mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa dari latar belakang Afrika Utara cenderung mengadopsi pendekatan yang beragam dalam berinteraksi dengan budaya Prancis, tergantung pada pengalaman pribadi, pendidikan, dan dukungan sosial yang mereka terima.

Dalam artikel ini mengungkapkan tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa Afrika Utara dalam proses akulturasi, termasuk stereotip dan diskriminasi yang mungkin mereka alami. Sementara itu, mahasiswa Prancis menunjukkan beragam sikap terhadap keragaman budaya, dengan beberapa yang lebih terbuka dan lainnya yang lebih skeptis. Penulis menekankan pentingnya menciptakan ruang dialog antarbudaya yang lebih inklusif, agar kedua kelompok dapat saling memahami dan berkontribusi pada kohesi sosial di lingkungan universitas. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang dinamika akulturasi dalam konteks pendidikan tinggi di Paris (Barrette dkk., 2004).

Artikel ilmiah selanjutnya *"Anti-racism, Racism and Asylum-Seekers in France"* membahas kompleksitas hubungan antara upaya anti-rasisme dan pengalaman pencari suaka di Prancis. Penulis mengeksplorasi bagaimana persepsi dan stigma yang melekat pada pencari suaka sering kali menghambat upaya integrasi mereka, serta memperkuat sikap rasis yang ada dalam masyarakat. Dengan menganalisis kebijakan pemerintah dan reaksi publik, jurnal ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pencari suaka dalam mendapatkan perlindungan dan dukungan, terutama dalam konteks meningkatnya sentimen nasionalis dan xenofobia.

Menyoroti berbagai inisiatif anti-rasisme yang muncul sebagai respons terhadap diskriminasi yang dialami oleh pencari suaka. Penulis menunjukkan pentingnya kolaborasi antara organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, dan individu untuk mempromosikan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu ini. Dengan menggabungkan teori dan data empiris, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana rasisme dan upaya anti-rasisme saling berinteraksi, serta menyerukan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap hak asasi manusia dalam perlakuan terhadap pencari suaka di Prancis (Lloyd, 2003).

Artikel ilmiah selanjutnya *"Palestinians and Europe's 'Refugee Crisis': Seeking Asylum in France in the Wake of the Syrian War"* mengkaji pengalaman pencari suaka Palestina di Prancis dalam konteks krisis pengungsi yang dipicu oleh perang di Suriah. Penulis menganalisis bagaimana kondisi politik dan sosial di Timur Tengah mempengaruhi mobilitas dan permohonan suaka Palestina, serta tantangan unik yang mereka hadapi di Eropa. Dengan menggabungkan wawancara dan analisis kebijakan, jurnal ini memberikan wawasan mendalam tentang harapan dan kesulitan yang dihadapi oleh pencari suaka Palestina, termasuk isu identitas, penerimaan, dan akses terhadap layanan dasar.

Selain itu, artikel ini menyoroti dinamika yang lebih luas antara pengungsi Palestina dan kebijakan migrasi Prancis, serta bagaimana stereotip dan prasangka memengaruhi persepsi publik terhadap mereka. Penulis menekankan pentingnya pemahaman yang lebih komprehensif tentang latar belakang sejarah dan politik

pengungsi Palestina, serta perlunya kebijakan yang lebih responsif dan inklusif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pandangan yang mendalam tentang pengalaman pencari suaka Palestina, tetapi juga mengajak pembaca untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam konteks kebijakan migrasi di Eropa (Gabiam, 2021).

Artikel ilmiah selanjutnya *"Kebijakan dan Politik Integrasi Imigran di Prancis"* mengkaji berbagai strategi dan pendekatan yang diterapkan oleh pemerintah Prancis dalam mengintegrasikan imigran ke dalam masyarakat. Penulis menganalisis kebijakan-kebijakan yang ada, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial, serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari imigran. Selain itu, penelitian ini juga membahas tantangan yang dihadapi, seperti diskriminasi, perbedaan budaya, dan ketidaksetaraan sosial, yang dapat menghambat proses integrasi.

Artikel ini juga menyoroti dinamika politik yang memengaruhi kebijakan integrasi, termasuk perdebatan publik tentang identitas nasional dan keamanan. Penulis menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menciptakan kebijakan yang inklusif, sentimen anti-imigran dan nasionalisme yang meningkat sering kali menghalangi kemajuan. Dengan mengkaji pengalaman imigran serta respons masyarakat, penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang kompleksitas integrasi dan pentingnya dialog yang konstruktif untuk menciptakan masyarakat yang lebih kohesif dan harmonis (Bandu & Hasyim, 2021).

Artikel ilmiah terakhir *"The Walls of France: An Actor-Oriented Analysis of Postwar Immigration Policy"* membahas kebijakan imigrasi Prancis setelah Perang Dunia II dengan pendekatan yang berfokus pada aktor-aktor kunci yang terlibat dalam proses pembentukan dan implementasi kebijakan tersebut. Penulis menganalisis bagaimana berbagai pihak—termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok imigran—berperan dalam membentuk dinamika kebijakan, serta bagaimana kebijakan tersebut mencerminkan kepentingan politik dan ekonomi yang lebih luas.

Selain itu, artikel ini menyoroti tantangan dan konsekuensi dari kebijakan imigrasi yang diterapkan, termasuk dampaknya terhadap integrasi sosial dan pengalaman imigran di Prancis. Dengan memeriksa interaksi antara aktor-aktor tersebut, penulis menunjukkan bahwa kebijakan imigrasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor struktural, tetapi juga oleh dinamika sosial dan budaya yang kompleks. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kebijakan imigrasi dapat membangun "tembok" baik secara literal maupun simbolis, yang membatasi akses dan peluang bagi imigran, serta mendorong perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam (Togman, 1997).

Tabel 2. 1 Tinjauan Literatur

NO	JUDUL	PENELITI	MAIN FINDING
1	"Assimilation and the Second Generation in Europe and America: Blending and Segregating Sosial Dynamics between Immigrants and Natives"	Lucas G. Drouhot, Victor Nee	Adanya dinamika sosial yang kompleks anatara imigran serta penduduk asli, dimana sering kali terjadi segregasi di dalam masyrakat, yang dapat dilihat dari beberapa akses serta hal lain yang dibedakan.
2	"The Migration Wave into Europe: An Existential Dilemma"	Fiamma Nirenstein	Dilema negara-negar di Eropa terhadap arus imigran yang dimana negara harus mempertimbangkan dua hal yang menjadi dilemma yaitu penegakan hak asasi manusia serta integrase sosial negara itu sendiri.
3	"Acculturation Orientations of French and North African	Genevidve Barretteu', Richard Y. Bourhisu, Marie Personnazb,	Tantangan yang didapat oleh imigran dalam bermasyrakat di Prancis termasuk diskrimansi dan *sterotype* yang didapat bagi imigran tertentu.

	Undergraduates in Paris"	Bernard Personnaz"	
4	"Anti-racism, Racism and Asylum-Seekers in France"	Catherine Lloyd	Bagaimana persepsi dan stigma yang melekat pada pencari suaka sering kali menghambat upaya integrasi mereka, serta memperkuat sikap rasis yang ada dalam masyarakat.
5	"Palestinians and Europe's 'Refugee Crisis': Seeking Asylum in France in the Wake of the Syrian War"	Nell Gabiam	Bagaimana kondisi politik dan sosial di Timur Tengah mempengaruhi mobilitas dan permohonan suaka, serta tantangan unik yang mereka hadapi di Eropa.
6	"Kebijakan dan Politik Integrasi Imigran di Prancis"	Wahyuddin, Irianti Bandu, Muhammad Hasyim	Berbagai strategi dan pendekatan yang diterapkan oleh pemerintah Prancis dalam mengintegrasikan imigran ke dalam masyarakat.
7	"The Walls of France: An Actor-Oriented Analysis of Postwar Immigration Policy"	Jeffrey M. Togman	Menyoroti tantangan dan konsekuensi dari kebijakan imigrasi yang diterapkan, termasuk dampaknya terhadap integrasi sosial dan pengalaman imigran di Prancis.

Sumber: Penulis

2.2. Kerangka Konseptual

2.2.1. Konstruktivisme

Teori konstruktivisme berasal dari perdebatan ketiga tahun 1980-an antara rasionalis dan teori kritis. Studi HI, terutama dialiran arus utama Amerika, terlibat dalam dua perdebatan selama tahun 1980an. Secara spesifik adalah antara Neo-Realis dan Neo-Liberalis, yang keduanya dianggap masuk dalam logika teori ekonomi rasionalis di HI, tetapi mencapai konklusi yang berbeda tentang potensi kerja sama internasional. Debat kedua adalah antara rasionalis dan teori kritis, yang menantang epistemologi, metodologi, ontologi, dan asumsi normatif dari neo-Realis dan neo-Liberalis. Para pendahulu menyatakan bahwa teori ini kurang substansial (Setiyaningsih, 2021).

Hadirnya Konstruktivisme dalam studi mulai Hubungan Internasional dimulai saat Nicholas Onuf memperkenalkan Konstruktivisme pada tahun 1989 melalui *"World of Our Making"* yang mana diperluas lagi oleh Alexander Wendt dalam artikelnya *"Anarchy is What States Makes Of It"* pada tahun 1992. Nicholas Onuf dalam *"World of Our Making"* meyakini bahwa kosntruksi sosial adalah pemicu bagi sebuah pengetahuan. Pengamat tidak pernah netral, karena pikiran dan peristiwa bukanlah fenomena yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, pengetahuan selalu dikaitkan dengan konteks tertentu. Dari sini kita sampai pada kesimpulan bahwa realitas dunia adalah hasil perbuatan manusia. Demikian pula integritas hubungan internasional merupakan produk ciptaan manusia. Konstruksi epistemik dinilai Unoff sebagai subjek tindakan atau tindakan berupa wacana yang mempunyai kekuatan untuk menciptakan masyarakat. Onoff juga menekankan bahwa makna realitas sosial bergantung pada keberadaan aturan karena aturan mengatur perilaku manusia dan dapat dipahami bersama. Oleh karena itu, bagi Onuf, hukum merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. (Rachmawati, 2018).

Setidaknya ada dua gagasan pokok dalam konstruktivisme yang relevan dengan kajian HI: Pertama, keyakinan bahwa struktur yang mempersatukan manusia ditentukan oleh ide-ide bersama (ideas) yang digunakan bersama) daripada kekuatan material. Keyakinan ini mewakili pandangan idealis yang pernah

mendominasi bidang HI, khususnya sebelum Perang Dunia II. kedua, keyakinan bahwa identitas dan kepentingan aktor lebih ditentukan oleh penalaran kolektif dibandingkan fenomena alam. Artinya tindakan masing-masing aktor tidak hanya ditentukan oleh motif, alasan, dan kepentingannya saja, melainkan tercipta melalui interaksi antar manusia dalam lingkungannya (sosial, politik, ekonomi, struktur budaya, dan sebagainya). Oleh karena itu, pandangan ini menunjukkan aliran strukturalisme dalam teori konstrutivisme (Hermawan, 2007). Dengan kata lain, para intelektual percaya bahwa dunia sosial bukanlah sesuatu yang diberikan, bahwa dunia sosial tidak "di luar sana" dan bahwa hukum dapat ditemukan melalui penelitian ilmiah dan dijelaskan dalam teori ilmiah, menurut behaviorisme dan positivisme, Melainkan dunia sosial adalah bidang interaktif. (Sørensen & Jackson, 2005).

Pembuatan suatu kebijakan berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh para teoritisi Konstruktivisme adalah bagaimana adanya respon dari aktor internasional, negara atau non;negara terhadap sebuah dinamika sosial yang terjadi baik itu diluar ataupu didalam negara atau non-negara itu sendiri. Hal ini dilakukan agar dapat membuat sebuah strategi yang tepat dan tidak hanya berdasar pada aspek material tapi juga melihat kondisi sosial yang ada agar dapat memutuskan kebijakan dengan tepat (Steele dkk., 2019). Oleh karena itu, norma membentuk identitas negara dan kemudian kepentingan tertentu. Norma bahkan dapat merekonstruksi identitas, sehingga kepentingan berubah seiring dengan itu, yang pada gilirannya mengubah kebijakan negara. Konstruktivis lebih sensitif terhadap kepentingan negara karena mereka percaya bahwa perubahan identitas akan mempengaruhi perubahan kepentingan negara, yang kesemuanya berkorelasi dengan perubahan struktur (Rachmawati, 2018).

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menggunakan konstruksi yang terjadi di masyarakat sebagai indikator dalam mengkaji isu krisis imigran yang terjadi di masyarakat serta menggunakan acuan *ideas* yang ditawarkan oleh konstruktivisme dalam mendalami kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Prancis. Adanya konstruksi yang terjadi didalam masyarakat Prancis dan para imigran yang datang memunculkan dinamika sosial yang kompleks yang pada akhir menjadi sebuah krisis yang berkepanjangan. Fenomena ini terjadi disebabkan oleh adanya

konstrusksi sosial antara para imigran yang datang dengan masyakarakat Prancis, adanya perbedaan secara budaya dan nilai dalam bermasyarakat membentuk sebuah konstruksi didalam masyarakat yang berujung pada adanya *steoretype* terhadap imigran dari negara tertentu. Dengan keadaan sosial masyarakat yang terjadi memunculkan adanya ketimpangan sosial yang terjadi antar para imigran di Prancis.

2.2.2. Konflik Sosial

Dalam konflik sosial, identitas orang-orang yang terlibat dalam perang tersebut tidak diketahui lagi. Identitas individu digantikan oleh identitas kelompok atau kelompok. Dengan kata lain, dalam konflik sosial yang dimaksud bukanlah konflik antara individu dengan identitasnya sendiri, melainkan antar individu yang mewakili identitas kelompok-kelompoknya. Ciri-ciri yang menentukan identitas seseorang berasal dari penilaian tertentu yang diberikan antarkelompok (Suparlan, 2006).

Pada teori konflik dijelaskan bahwa dasar dari adanya perubahan sosial pada masyarakat diawali dengan adanya sebuah konflik. Konlik akan selalu ada sebagai geolak sosial dalam kehidupan bermasyarakat baik itu bersifat individu maupun berkelompok. Menurut coser setiap interaksi sosial memiliki tingkat antagonisme tertentu, ketegangan, atau perasaan tidak menyenangkan (Johnson, 1990). Hal ini merupakan akibat dari kebutuhan seseorang atau kelompok akan kesejahteraan, kekuasaan, prestise, dukungan sosial, atau imbalan lainnya. Sedangkan setiap orang atau kelompok mempunyai banyak perbedaan dan banyak pula ciri-cirinya. Ciri-ciri dan perbedaan tersebut berkaitan dengan jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, budaya, pemikiran, gaya hidup, kepercayaan, minat, dan banyak lagi (Sumartias & Rahmat, 2013).

Dengan penjelasan diatas konflik sosial yang terjadi di masyarakat Prancis merupakan sebuah awal dari adanya perubahan sosial yang terjadi seperti yang dijelaskan oleh Coser bahwa akar dari adanya perubahan sosial adalah konflik, dengan terjadinya konflik anatara imigran dengan warga local di Prancis membuat dinamika sosial yang ada negara tersebut berubah dan membuat isu imigran menjadi sesuatu yang umum di Prancis.

2.2.3. Konsep Refugees

Menurut pandangan klasik imigrasi merupakan sebuah kegaiatan berpindah dari negara asal ke negara lain dengan tujuan mencari pekerjaan atau menetap disana. Penjelasan tentang imigrasi ini dikemukakan pada Konferensi Internasional Roma pada tahun 1924 yang menjelaskan tentang emigrasi dan imigrasi. Kemudian seiring berjalannya waktu pengertian dari imigrasi sendiri meluas yang tidak hanya melihat pada gerakan individu melaikan berkelompok serta menjadi kebutuhan yang terorganisir (Maulidia, 2022). Imigrasi bisa terjadi karena adanya banyak faktor, jika dilihat dari sudut pandang imigran yang akan menuju negara tertentu maka secara umum ekonomi, kondisi politik negara yang tidak stabil, serta adanya bencana alam yang terjadi di negara tersebut menjadi pemicu gerakan imigrasi terjadi. Namun jika dilihat dari kacamata negara yang penerima maka faktor utama diterimanya imigran biasanya dipengaruhi oleh adanya kebutuhan tenaga kerja yang pada prosesnya dilakukan secara terorganisir (Santoso, 2014).

Proses imigran pada dasarnya merupakan sebuah perpindahan manusia dari negara asalnya ke-negara lain, namun pada prosesnya sendiri seringkali ada tantangan yang akan dihadapi oleh para imigran hal ini dikarenakan adanya perbedaan nilai, kebudayaan, bahasa yang menghambat proses integrasi dengan warga lokal yang tidak jarang memunculkan diskriminasi kepada para imigran (Alamari, 2020). Dengan paparan diatas konsep imigrasi membantu peneliti dalam mengetahui latar belakang serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses imigrasi, serta membantu mengetahui berbagai tujuan suatu imigrasi dilakukan dan yang terakhir membantu peneliti melihat tentang tantangan yang terjadi bagi para imigran dalam proses integrase dengan penduduk lokal.

Banyak ahli yang mengadopsi pengertian pengungsi, seperti yang dijelaskan oleh Pietro Veri pada ketentuan Pasal 1 Konvensi PBB tentang Patung tahun 1951, yaitu *“applies to many people who have fled the country of his nationality to avoid persecution or the threat of persecution”*.Petro Veri berpendapat bahwa pengungsi yang dianggap pengungsi adalah mereka yang secara sukarela meninggalkan negaranya karena takut akan penganiayaan (Shalihah & Nur, 2021). Selain itu,

menurut Malcolm Pradfoot, ia menyampaikan pandangannya mengenai definisi pengungsi berdasarkan situasi pengungsi pada masa Perang Dunia Kedua. Dikatakannya, pengungsi adalah orang-orang yang terpaksa pindah dari tempat asalnya ke tempat lain karena menghadapi tindakan negatif seperti persekusi, deportasi karena tindakan politik dan resmi pemerintah yang berbeda, konflik bersenjata yang dilakukan oleh sekelompok orang di negara yang sama , menyebar. perang antar negara yang membahayakan kehidupan dan kesejahteraan orang-orang yang tinggal di sana, dan menggunakan warga negara untuk berpartisipasi dalam perang Jerman dan jenis perang lainnya (Romsan dkk., 2003).

Dengan penjelasan diatas konsep pengungsi membantu peneliti dalam mengembangkan cakupan yang luas tentang bagaimana para pendatang yang tiba di Prancis meiliki latar belakang yang berbeda serta memberikan gambaran bahwa adanya perlindungan secara hukum dan kemanusiaan terhadap para pengungsi.

2.2.4. Kebijakan

Secara etimologis, kata politik berasal dari kata Yunani “polis” yang berarti negara, kota, dan jika diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi “politia” yang berarti negara. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai “policie” yang mengacu pada pengelolaan urusan publik atau administrasi publik. Istilah “kebijakan” atau “kebijakan” digunakan untuk merujuk pada perilaku seorang aktor (misalnya pejabat, kelompok, atau kelompok publik) atau serangkaian aktor di suatu tempat kerja (Nur & Guntur, 2019).

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan mencakup peraturan, undang-undang, dan pedoman yang dirancang untuk memandu tindakan individu atau kelompok dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik. Kebijakan biasanya dibentuk melalui proses analisis masalah, perumusan alternatif, dan pemilihan solusi yang dianggap paling efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan (Dunn, 2015). Dengan begitu proses analisis dilakukan oleh pemerintah Prancis dalam merumuskan suatu kebijakan serta memilah solusi mana yang paling efektif dalam menangani isu imigran di negara tersebut.

Kebijakan selalu kontroversial dan selalu perlu dipertanyakan lagi, baik itu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maupun kebijakan yang ditawarkan oleh dunia usaha, lembaga, atau organisasi nirlaba. Masyarakat selalu aktif berdiskusi mengenai politik, baik internal maupun eksternal, serta selalu memaparkan permasalahan-permasalahan yang muncul demi tercapainya politik yang baik dan adil (Nur & Guntur, 2019). Dengan penjelasan diatas kebijakan yang disahkan oleh Prancis pasti akan banyak sekali mendapatkan pertanyaan atas kebijakan tersebut karena sebuah kebijakan tidak akan bisa lepas dari terpecahnya dua pihak setuju dan tidak setuju.

2.3. Asumsi penelitian

Asumsi Penelitian adalah merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian, yang bertujuan untuk menjadikan asumsi ini sebagai acuan dalam menentukan langkah selanjutnya agar dapat membuat kesimpulan-kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan. Maka dari itu ada sebuah asumsi yang peneliti paparkan: *Prancis sebagai salah satu negara dengan jumlah imigran terbanyak di Eropa membuat sebuah kebijakan bernama Asylum and Immigration Act dengan mempertimbangkan kondisi sosial serta nilai dari negara Prancis yaitu kebebasan secara individu serta hak asasi manusia, sehingga dapat menstabilkan dinamika yang terjadi pada para imigran dan penduduk asli di Prancis, namun masih banyak kesenjangan yang terjadi serta penindasan terhadap paara imigran.*

2.4. Kerangka Analisis

Gambar 2. 1 Kerangka Analisis

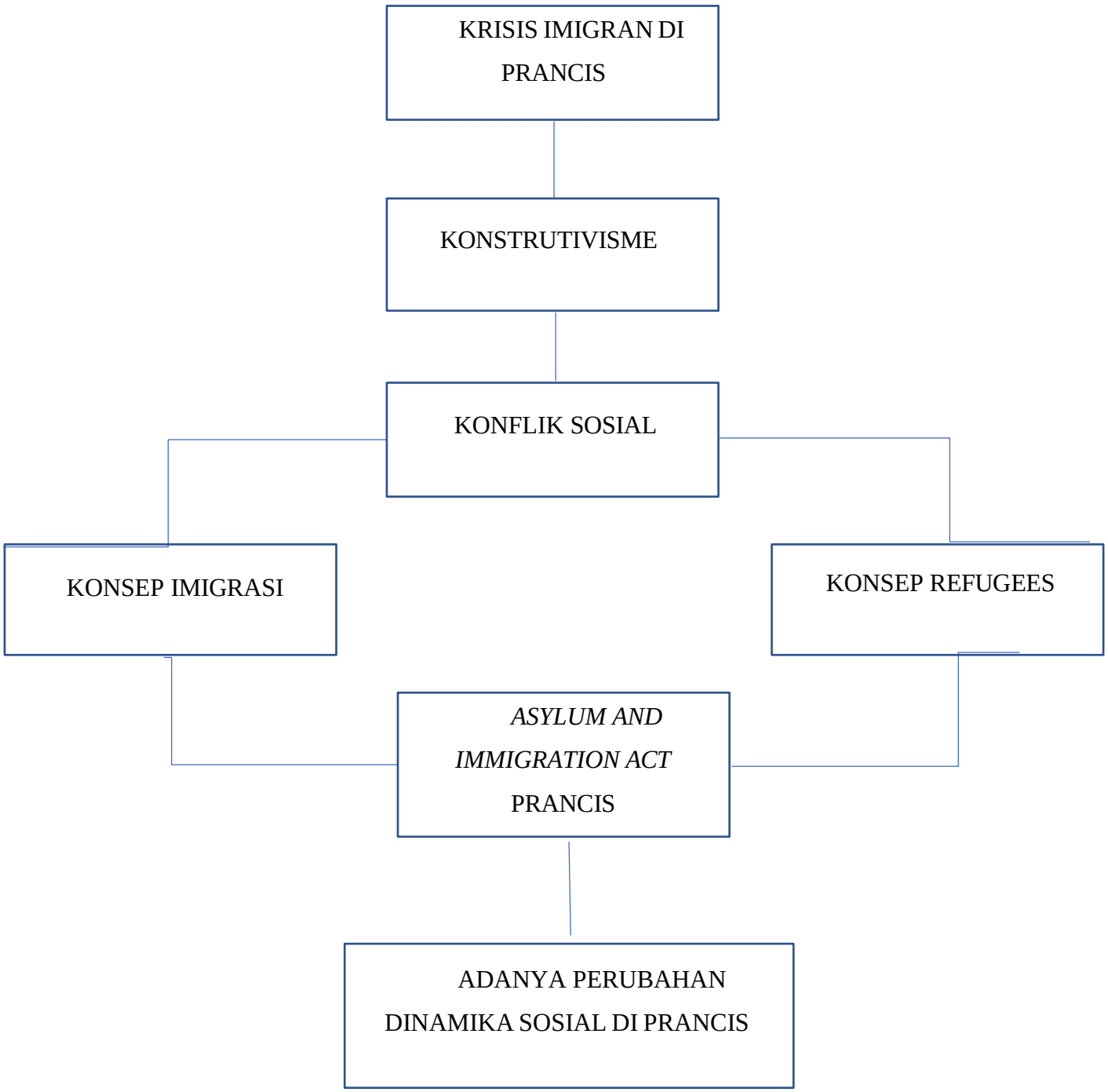

Sumber: Penulis